



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk berhubungan dengan negara lain, Indonesia melakukan politik luar negeri. Mochlisin (2007: 51) menjelaskan bahwa salah satu poin penting dari politik luar negeri Indonesia adalah Indonesia bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Dalam hal ini, Indonesia mengadakan hubungan yang baik, terutama dengan negara-negara tetangga.

Salah satu negara tetangga Indonesia adalah Australia. Prabaningtyas (2013:2) menyebutkan bahwa hubungan Indonesia-Australia adalah *love-hate relationship*. Hubungan itu akan mengalami naik turun, mengingat kedua negara ini secara politik memiliki *nature* yang berbeda, tetapi posisi geografis yang menjadikan kedua negara ini bertetangga mengharuskan serangkaian kompromi tetap diupayakan. Indonesia dan Australia sama-sama memahami bahwa situasi regional dan internasional saat ini tidak akan kondusif jika konfrontasi dilanjutkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak. Faktor non-politis lah yang memiliki daya pengikat untuk mengantisipasi ketegangan politik dan juga mengembalikan kepercayaan Indonesia. Kepercayaan Indonesia pada Australia kembali diuji ketika munculnya pemberitaan terkait penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia.

Kabar penyadapan ini berawal dari laporan dari media Australia, *The Sydney Morning Herald (SMH)*, pada 31 Oktober 2013 pada berita berjudul “*Exposed: Australia's Asia spy network*”. Pada berita itu disebutkan bahwa pemerintah Australia menggunakan kedutaan besarnya di lima ibukota negara—Beijing, Jakarta, Dili, Hanoi, dan Tokyo—sebagai markas melakukan operasi intelijen penyadapan.

Isu terkait penyadapan ini kian memanas saat muncul bocoran terbaru dari Snowden yang diungkap oleh media daring Inggris *The Guardian* berjudul “*Australia's spy agencies targeted Indonesian president's mobile phone*” pada 18 November 2013. Dalam laporan itu terungkap bahwa Australia menyadap percakapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara beserta delapan pejabat lainnya, termasuk Wapres Jusuf Kalla, dan Jubir Kepresidenan Andi Alfian Mallarangeng.

Munculnya perkembangan terbaru dari isu penyadapan ini menimbulkan reaksi masyarakat Indonesia yang ditujukan melalui media. Peristiwa ini memicu kemarahan Indonesia. Dalam pemberitaan *Koran Sindo* edisi 19 November 2013 yang berjudul “Indonesia Panggil Pulang Dubes di Canberra”, Menkopolkam Djoko Suyanto mengatakan atas tindakan yang kelewat batas ini, Pemerintah Indonesia akan mengkaji kerja sama pertukaran informasi dengan Australia. Namun, di sisi lain, penyadapan dianggap sebagai praktek lazim yang dilakukan badan intelijen dalam mengumpulkan informasi. Menurut pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie dalam *Koran Tempo* edisi 4 November 2013 yang berjudul “Kemampuan Intelijen dalam Mengantisipasi Ancaman Merosot”,

intelijen penyadapan selalu berubah dari waktu ke waktu dan (upaya menghadapi penyadapan) harus selalu mengikuti perkembangan teknologi dan ancaman sehingga sudah seharusnya Tentara Nasional Indonesia dipersiapkan baik dari sisi doktrin, peralatan, personal maupun (adanya) pelatihan yang mumpuni sesuai dengan perkembangan ancaman.

Setelah melihat reaksi atas kasus penyadapan ini, maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana media massa mengonstruksi kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia dengan menggunakan analisis *framing* model Pan dan Kosicki. Alasan pemilihan model *framing* itu, karena penulis ingin melihat koherensi informasi yang telah disusun menjadi teks berita sehingga menonjolkan suatu informasi yang akhirnya membentuk opini publik. Untuk melihat bagaimana media mengonstruksi isu penyadapan ini, peneliti memilih satu surat kabar, yaitu *Kompas*. Pemilihan surat kabar *Kompas* disebabkan karena harian itu menjadi rujukan media internasional sehingga pemberitaannya juga mempengaruhi opini masyarakat internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana surat kabar *Kompas* mengonstruksi kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan konstruksi yang dilakukan surat kabar *Kompas* pada kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademis

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai bagaimana pemberitaan pada sebuah media massa dalam mengonstruksikan sebuah isu yang sedang berkembang. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada studi analisis *framing* terkait kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi praktisi media massa mengenai bagaimana melihat sebuah peristiwa, kemudian mbingkainya menjadi sebuah berita. Selain itu, juga memberikan gambaran secara umum bagaimana sebuah berita dikemas menjadi berita yang layak disuguhkan kepada masyarakat.

UMMN